



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln Raya Watu Klotok Tojan, Klungkung Telp. (0366) 21087

**RENJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2019**

**KLUNGKUNG
2019**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Renja Perubahan Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dishub ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dishub di tahun 2019 dan menyelaraskan dengan perencanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.

Dalam Penyusunan Renja Perubahan Dishub dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dimana dalam Penyusunan Renja Perubahan 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 ini tentu jauh dari sempurna karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi, sehingga diperlukan adanya masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan penyempurnaan Renja ini.

Demikian Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 ini disusun, semoga dapat dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang nantinya menjadi dasar dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan bermanfaat dalam evaluasi kegiatan dan pelaporan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klungkung,


Drs. I Nyoman Sucitra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196242311990031147



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra PD.....	5
2.2 Permasalahan dan Pelayanan PD	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DISHUB	14
3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas PD.....	14
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Dishub 2018	17
BAB IV PENUTUP	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk perencanaan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2019, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2019. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan RKPD untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan RKPD ini dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan evaluasi Renja Perangkat Daerah Dishub tahun 2019 pada Triwulan I dan II, terdapat perkembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal disusun Renja PD Dishub, yaitu meliputi penyesuaian masalah pembangunan, penambahan dan pengurangan kegiatan dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukannya perubahan Renja PD Dishub tahun 2019.

Renja PD tahun 2019 secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, meliputi:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra PD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan



- b. Menjadi acuan penyusunan Perubahan program/ kegiatan PD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra Dishub Kabupaten Klungkung.
- d. Menjadi instrumen dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P.
- e. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Perubahan Renja Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk:

- Menyediakan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Dishub dalam rangka menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Tahun 2019
- Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishub Kabupaten Klungkung.
- Sebagai pedoman target yang ingin dicapai di pada Tahun Anggaran 2019 serta dana yang dibutuhkan.



B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja PD adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Perubahan Renja Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra PD.
- 2.2. Permasalahan Pelayanan PD

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Perubahan Target Kinerja Prioritas PD
- 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan prioritas PD

Bab IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

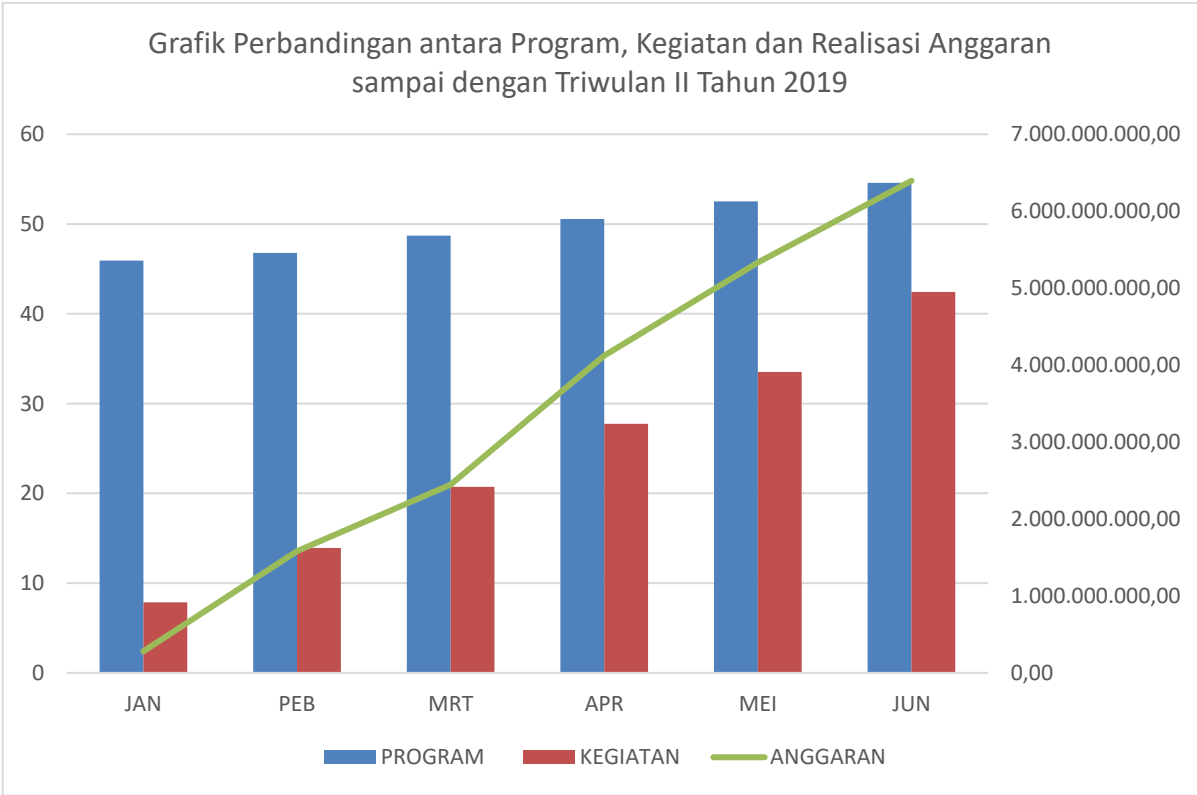
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra PD.

Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja pada Bidang urusan perhubungan telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dimana dalam pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui pelaksanaan 5 program dan 20 kegiatan.

Bidang Urusan Perhubungan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja per akhir triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 54,58 persen, dan rata-rata capaian kinerja output kegiatan adalah sebesar 42,44 ”
- b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.395.869.869,00 atau sebesar 29,50% persen dengan predikat “SR.” dari total anggaran sebesar Rp 21.680.478.636,00

Tabel. 2.1
Realisasi Anggaran, Program dan Kegiatan
sampai dengan Triwulan II Tahun 2019





Tabel. 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dishub dan
Pencapaian Renstra Dishub s/d Tahun 2019 (Triwulan II)
Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun lalu		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai Triwulan II tahun berjalan						Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan				
							Target Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2019)		Realisasi Renja SKPD Tahun berjalan (s/d Triwulan II)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.	Urusan Wajib			396.179.292.328,00														
2.09	Bidang Urusan Perhubungan			396.179.292.328,00				21.680.478.636,00		6.395.869.869,00		29,50		15.284.608.767,00		21.680.478.636,00		
2.09.09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20	6.560.134.819	0	0	17,5	1.085.933.400,00	7,81	376.036.003	44,63	34,63	9,69	709.897.397,00	17,5	1.085.933.400,00	87,5	16,55
2.09.09.01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	5.008.945.856	100	0	100	792.031.339,00	49,98	276.690.453	49,98	34,93	50,02	515.340.886,00	100	792.031.339,00	100	15,81
2.09.09.02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin aparatur (%)	100 %	659.250.456	100	0	100	162.529.456,00	49,98	40.581.290	49,98	24,97	50,02	121.948.166,00	100	162.529.456,00	100	24,65
2.09.09.03	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	100 %	131.108.132	100	0	100	20.739.652,00	49,98	8.615.930	49,98	41,54	50,02	12.123.722,00	100	20.739.652,00	100	15,82
2.09.09.04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	9 dok	396.686.134	9	0	9	78.668.052,00	5	33.344.330	55,56	42,39	4	45.323.722,00	9	78.668.052,00	100	19,83
2.09.09.05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dok)	23 dok	172.343.388	23	0	23	8.550.901,00	10	3.708.500	43,48	43,37	13	4.842.401,00	23	8.550.901,00	100	4,96
2.09.09.06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dok)	12 dok	191.800.853	12	0	12	23.414.000,00	6	13.095.500	50,00	55,93	6	10.318.500,00	12	23.414.000,00	100	12,21
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana Perhubungan yang sesuai standar dan peningkatan mutu operasional prasarana Perhubungan (%)	100 %	245.157.071.123	100	0	100	1.612.228.730,00	49,98	587.694.252	49,98	36,45	50,02	1.024.534.478,00	100	1.612.228.730,00	100	0,66



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun lalu		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai Triwulan II tahun berjalan						Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan				
							Target Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2019)		Realisasi Renja SKPD Tahun berjalan (s/d Triwulan II)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.09.15.01	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sesuai dengan standar yang berlaku (%)	100	%	1.010.611.300	100	0	100	14.034.900,00	49,98	11.586.200	49,98	82,55	50,02	2.448.700,00	100	14.034.900,00	100	1,39
2.09.15.03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai dengan standar yang berlaku (%)	100	%	233.147.208.300	50	0	100	175.682.900,00	49,98	28.979.400	49,98	16,50	50,02	146.703.500,00	100	175.682.900,00	100	0,08
2.09.15.12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Peningkatan mutu operasional /pengoperasian prasarana perhubungan (%)	100	%	4.389.148.581	25	0	100	256.664.452,00	49,98	136.500.478	49,98	53,18	50,02	120.163.974,00	100	256.664.452,00	100	5,85
2.09.15.13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Peningkatan mutu operasional/pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan (%)	100	%	960.458.246	50	0	100	990.112.262,00	49,98	339.102.734	49,98	34,25	50,02	651.009.528,00	100	990.112.262,00	100	103,09
2.09.15.14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	100	%	5.649.644.696	100	0	100	175.734.216,00	49,98	71.525.440	49,98	40,70	50,02	104.208.776,00	100	175.734.216,00	100	3,11
2.09.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load Faktor Angkutan Darat (%)	80	%	98.718.282.746	60	70	11.986.412.776,00	62	3.467.293.858	88,571	28,93	8	8.519.118.918,00	70	11.986.412.776,00	70	12,14	
		Load Faktor Angkutan Laut (%)	90	%		75	0		83,4	60	71,94	23,4	83,4						
2.09.17.18	Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)	100	%	28.651.192.932	100	0	100	55.025.100,00	49,98	4.144.100	49,98	7,53	50,02	50.881.000,00	100	55.025.100,00	100	0,19
2.09.17.21	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)	100	%	1.379.898.416	100	0	242.480.760,00	49,98	96.130.550	49,98	39,64	50,02	146.350.210,00	100	242.480.760,00	100	17,57	
		Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)	100	%		100	0		100	0,00	100								
2.09.17.22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek	Persentase layanan angkutan darat dalam trayek yang laik operasi (%)	100	%	68.687.191.398	100	0	100	11.688.906.916,00	49,98	3.367.019.208	49,98	28,81	50,02	8.321.887.708,00	100	11.688.906.916,00	100	17,02



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun lalu		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai Triwulan II tahun berjalan						Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan					
							Target Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2019)		Realisasi Renja SKPD Tahun berjalan (s/d Triwulan II)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.09.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas	Derajat kejenuhan Lalu-lintas (%)	42	%	42.003.491.252	50	0	50	6.659.493.678,00	71	1.936.981.326	58	29,09	21	4.722.512.352,00	50	6.659.493.678,00	70	15,85
2.09.19.06	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Pemenuhan pengadaan dan pengawasan Lalu-lintas (%)	100	%	3.107.690.612	100	0	100	474.290.460,00	49,98	226.023.830	49,98	47,66	50,02	248.266.630,00	100	474.290.460,00	100	15,26
2.09.19.09	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	100	%	141.990.000	100	0	100	9.100.000,00	49,98	2.333.000	49,98	25,64	50,02	6.767.000,00	100	9.100.000,00	100	6,41
2.09.19.10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas	Tersedianya perencanaan dan pemenuhan Perlengkapan jalan (%)	100	%	38.753.810.640	100	0	100	6.176.103.218,00	49,98	1.708.624.496	49,98	27,67	50,02	4.467.478.722,00	100	6.176.103.218,00	100	15,94
2.09.25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan Angka Kecelakaan (30%)	25	%	3.740.312.388	42	0	30	336.410.052,00	48	27.864.430	40	8,28	18	308.545.622,00	30	336.410.052,00	20	8,99
2.09.25.01	Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	5	inovasi	2.795.279.800	1	0	1	264.856.900,00	1	726.000	100	0,27	0	264.130.900,00	1	264.856.900,00	20	9,48
2.09.25.02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Persentase penyusunan kebijakan Norma, standar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan	100	%	388.705.798	25	0	25	14.481.000,00	0	1.632.000	0,00	11,27	25	12.849.000,00	25	14.481.000,00	25	3,73
2.09.25.03	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan jasa Perhubungan	Persentase sosialisasi keselamatan yang dilaksanakan (%)	100	%	556.326.790	25	0	100	57.072.152,00	49,98	25.506.430	49,98	44,69	50,02	31.565.722,00	100	57.072.152,00	100	10,26

Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.2 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu meliputi beberapa faktor :
 - Perubahan Cascading pada Dinas Perhubungan 2019, menyebabkan perubahan program dan kegiatan beserta perubahan indikator kinerjanya yang telah dimasukan dalam Renstra Dishub Tahun 2018-2023. Sehingga Renja Tahun 2019 harus menyesuaikan dengan indikator kinerja terbaru.
 - Tidak tercapainya target dikarenakan Penyediaan Barang dan Jasa yang melalui proses seleksi dan ada yang mengalami gagal tender
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui e-purchasing masih dalam proses administrasi.
 - Kendala yang terjadi dalam proses administrasi menyebabkan kegiatan belum realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD yaitu terdapat rogram dan kegiatan yang tidak berlanjut di tahun 2019 dikarenakan perubahan struktur organisasi dan perubahan cascading menyesuaikan dengan Tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 139 Tahun 2016
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu meliputi :
 - Membuat Cascading dan ditetapkan bersama indikator kinerjanya dan dijadikan dasar dalam melaksanakan Kinerja Program dan Kinerja Kegiatan selama 5 Tahun, atau satu periode Rentra PD
 - Mempercepat Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan melalui pelaksanaan yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan per triwulan.
 - Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing.
 - Melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja setiap Triwulan

2.2. Permasalahan Pelayanan PD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishub Tahun 2019 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Urusan Perhubungan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
3. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD berdasarkan Analisa S W O T

- **Analisis Lingkungan Internal**

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perhubungan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan

- jumlah aparaturnya sebagaimana program Pemerintah Kabupaten juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan. Pelayanan sektor perhubungan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan baik melalui APBD maupun APBN.
 4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

- **Analisis Lingkungan Eksternal**

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung meliputi :

- a. Peluang (Opportunity)**

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi Kabupaten Klungkung, yaitu Rencana keberadaan Pelabuhan Segitiga emas/ Dermaga Gunksa;
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;

Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Disiplin pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
2. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan;
3. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;
5. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;
6. Belum optimalnya pelayanan angkutan laut antar pulau, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;
7. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Klungkung.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DISHUB KABUPATEN KLUNGKUNG

3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas PD

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala (S.W.O.T) yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung tahun 2019 telah tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 yang berisi tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan selama lima tahun.

Dokumen Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta kegiatan Dishub Kabupaten Klungkung dipakai sebagai acuan atau panduan bagi seluruh Bidang di lingkup Dishub Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini juga merupakan komitmen dan tekad Dishub untuk berperan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Klungkung sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Pada tahap selanjutnya, dokumen Rencana Strategis ini dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dishub sebagai pegangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dishub Kabupaten Klungkung dalam setiap tahunnya.

Sesuai dengan pedoman yang berlaku, rumusan materi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung periode 2018-2023 meliputi Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan serta sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Visi dan Misi Kabupaten

Memasuki pembangunan Kabupaten Klungkung pada periode lima tahun (2018-2023), Kabupaten Klungkung sebagai salah satu pelaku pembangunan ingin mewujudkan pencapaian Misi "**TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA**". Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Klungkung pada periode 2018-2023. Rakyat Klungkung yang Unggul dan Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat Klungkung.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dituntut untuk mampu mewujudkan Visi Pembangunan Klungkung 2018-2023, melalui penetapan Tujuan dan Sasaran kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan.

Misi Kepala Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018 – 2023 yaitu :

- (1). Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya
- (2). Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- (3). Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan
- (4). Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik
- (5). Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung pada periode 2018-2023 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh pencapaian Misi yang diemban oleh Dinas Perhubungan sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Misi yang dilaksanakan oleh dinas Perhubungan yaitu Misi ke-5 : Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tetap terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, dimana Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan yang telah diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel.
Penjabaran Tujuan, Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023 dalam Urusan Perhubungan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal 2018	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir (%)
					2019	2020	2021	2022	2023	
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	$\frac{\sum \text{Penumpang Angk. Darat Th. } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Th. } (n-1)} \times 100\%$	454.220 orang	4	10	5	5	5	29
		Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	$\frac{\sum \text{Penumpang Angk. Laut Th. } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Th. } (n-1)} \times 100\%$	2.226.214 orang	5	5	5	5	5	25

Tujuan dan sasaran OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung selaras dan mendukung Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung. Maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung juga mendukung Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Keselarasan Hubungan antara Tujuan Sasaran RPJMD dan Tujuan Sasaran OPD dalam Bidang Perhubungan

Tujuan RPJMD	Tujuan OPD
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan
Sasaran RPJMD	Sasaran OPD
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan
Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan dan Sasaran OPD
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)



3.2 Perubahan Program dan Kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dishub 2019

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2019 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishub mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2018-2023. Pada Perubahan Renja Tahun 2019 terdapat perubahan Indikator Program dan Indikator Kegiatan dikarenakan penyesuaian perkembangan dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 dengan menyesuaikan dengan target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Salah satunya yaitu pada Program Pelayanan Kesekretariatan sebagai akibat penyesuaian dengan Target Penilaian RB yang sedang ditingkatkan dan dimulai pada tahun 2019, dan pada Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida dimana terjadi Penggabungan 2 UPT menjadi satu UPTD. Yaitu UPT. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan UPT. Dishub Nusa Penida menjadi UPTD. Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida. Rincian program dan kegiatan yang direncanakan pada Perubahan Renja 2019 dijelaskan pada Tabel 3.1. dan 3.2.

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2019

SASARAN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) RENJA 2019		KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) RENJA PERUBAHAN 2019	
		Indikator/ Satuan	Indikator/ Satuan	Rencana	Indikator/ Satuan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata Capaian Output Kegiatan (%)	90	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	17,5
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur (%)	100	Capaian Disiplin Aparatur (%)	90
	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai Klasifikasi (%)	100	Persentase surat yang diarsipkan sesuai Klasifikasi (%)	85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	9	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	9
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu (dok)	23	Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu (dok)	23
	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu (dok)	12	Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu (dok)	12
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pemenuhan Prasarana Transportasi Perhubungan Sesuai Standar (%)	100	Cakupan Pemenuhan Prasarana Transportasi Perhubungan Sesuai Standar (%)	30
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pemenuhan Perencanaan Prasarana Perhubungan	100	Cakupan Pemenuhan Perencanaan Prasarana Perhubungan	35
	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Prasarana Perhubungan Sesuai Standar yang Dibangun	100	Jumlah Prasarana Perhubungan Sesuai Standar yang Dibangun	30
	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Cakupan Prasarana Perhubungan Yang Beroperasi sesuai Standar	100	Cakupan Prasarana Perhubungan Yang Beroperasi sesuai Standar	35
	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Cakupan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang Beroperasi sesuai Standar	100	0	0
	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar	100	Cakupan Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	60



SASARAN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) RENJA 2019		KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) RENJA PERUBAHAN 2019	
		Indikator/ Satuan	Indikator/ Satuan	Rencana	Indikator/ Satuan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load Faktor Angkutan Darat (%)	70	Load Faktor Angkutan Darat (%)	70
		Load Faktor Angkutan Laut (%)	83,37	Load Faktor Angkutan Laut (%)	83,37
	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase Angkutan Tidak Dalam Trayek Yang Laik Operasi (%)	100	Persentase Angkutan Tidak Dalam Trayek Yang Laik Operasi (%)	60
	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Darat yang laik Jalan (%)	100	Persentase Angkutan Darat yang laik Jalan (%)	100
		Persentase Angkutan Laut yang laik jalan (%)	100	Persentase Angkutan Laut yang laik jalan (%)	100
	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek	Persentase Angkutan Dalam Trayek Yang laik Operasi (%)	100	Persentase Angkutan Dalam Trayek Yang laik Operasi (%)	60
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu-lintas	Titik Jenuh Lalu-lintas (%)	50	Titik Jenuh Lalu-lintas (%)	50
	Kegiatan Pegendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan Pemenuhan Rekayasa Lalu-lintas (%)	100	Cakupan Pemenuhan Rekayasa Lalu-lintas (%)	60
	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi Analisa Dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	100	Rekomendasi Analisa Dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	35
	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas	Cakupan Perencanaan Pengaturan Lalu-lintas Terpenuhi (%)	100	Cakupan Perencanaan Pengaturan Lalu-lintas Terpenuhi (%)	60
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan Angka Kecelakaan (%)	30	Penurunan Angka Kecelakaan (%)	40
	Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi Teknologi Perhubungan yang di laksanakan (inovasi)	1	Inovasi Teknologi Perhubungan yang di laksanakan (inovasi)	1
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan , Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Penurunan Angka Kecelakaan (kerjasama)	3	Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Penurunan Angka Kecelakaan (kerjasama)	35
	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Rekomendasi Hasil Audit Keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	Rekomendasi Hasil Audit Keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	60



Tabel. 3.2.
Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan
Pada APBD Induk Tahun 2019 dan Rencana Perubahan Tahun 2019

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDUK TAHUN 2019			PERUBAHAN TAHUN 2019			CATATAN
					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1				2	3	4	5		6	7	8
2				URUSAN WAJIB			21.680.478.636,00			20.548.505.673,00	
2	09			BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN			21.680.478.636,00			20.548.505.673,00	
2	09	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata Capaian Output Kegiatan (%)	90	1.085.933.400,00	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	17,5	1.085.933.400,00	Perubahan Indikator Kinerja
2	09	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	792.031.330,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80	792.031.330,00	
2	09	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur (%)	100	162.529.456,00	Capaian Disiplin Aparatur (%)	90	162.529.456,00	
2	09	09	03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai Klasifikasi (%)	100	20.739.652,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai Klasifikasi (%)	85	20.739.652,00	
2	09	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	9	78.668.052,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	9	78.668.052,00	
2	09	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu (dok)	23	8.550.901,00	Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu (dok)	23	8.550.901,00	
2	09	09	05	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu (dok)	12	23.414.000,00	Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu (dok)	12	23.414.000,00	
2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pemenuhan Prasarana Transportasi Perhubungan Sesuai Standar (%)	100	1.612.228.730,00	Cakupan Pemenuhan Prasarana Transportasi Perhubungan Sesuai Standar (%)	30	1.612.228.730,00	
2	09	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pemenuhan Perencanaan Prasarana Perhubungan	100	14.034.900,00	Cakupan Pemenuhan Perencanaan Prasarana Perhubungan	35	14.034.900,00	
2	09	15	03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Prasarana Perhubungan Sesuai Standar yang Dibangun	100	175.682.900,00	Jumlah Prasarana Perhubungan Sesuai Standar yang Dibangun	30	175.682.900,00	



KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDUK TAHUN 2019			PERUBAHAN TAHUN 2019			CATATAN
					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1				2	3	4	5		6	7	8
2	09	15	12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Cakupan Prasarana Perhubungan Yang Beroperasi sesuai Standar	100	256.664.452,00	Cakupan Prasarana Perhubungan Yang Beroperasi sesuai Standar	35	256.664.452,00	
2	09	15	13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Cakupan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang Beroperasi sesuai Standar	100	990.112.262,00	0	0	990.112.262,00	Penggabungan 2 UPT menjadi 1 UPTD
2	09	15	14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar	100	175.734.216,00	Cakupan Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	60	175.734.216,00	
2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load Faktor Angkutan Darat (%)	70	11.986.412.776,00	Load Faktor Angkutan Darat (%)	70	10.836.213.196,8	Anggaran Turun sebagai Silpa dari Kegiatan Angkutan siswa dan Jasa Operasional Ro-ro
					Load Faktor Angkutan Laut (%)	83,37		Load Faktor Angkutan Laut (%)	83,37		
2	09	17	18	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase Angkutan Tidak Dalam Trayek Yang Laik Operasi (%)	100	55.025.100,00	Persentase Angkutan Tidak Dalam Trayek Yang Laik Operasi (%)	60	55.025.100,00	
2	09	17	21	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Darat yang laik Jalan (%)	100	242.480.760,00	Persentase Angkutan Darat yang laik Jalan (%)	100	242.480.760,00	
					Persentase Angkutan Laut yang laik jalan (%)	100		Persentase Angkutan Laut yang laik jalan (%)	100		
2	09	17	22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek	Persentase Angkutan Dalam Trayek Yang laik Operasi (%)	100	11.688.906.916,00	Persentase Angkutan Dalam Trayek Yang laik Operasi (%)	60	10.538.707.336,80	Anggaran Turun sebagai Silpa dari Kegiatan Angkutan siswa dan Jasa Operasional Ro-ro
2	09	19		Program Pengendalian dan pengamanan lalu-lintas	Titik Jenuh Lalu-lintas (%)	50	6.659.493.678,00	Titik Jenuh Lalu-lintas (%)	50	6.659.493.678,00	
2	09	19	6	Kegiatan Pegendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan Pemenuhan Rekayasa Lalu-lintas (%)	100	474.290.460,00	Cakupan Pemenuhan Rekayasa Lalu-lintas (%)	60	474.290.460,00	
2	09	19	9	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi Analisa Dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	100	9.100.000,00	Rekomendasi Analisa Dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	35	9.100.000,00	



KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDUK TAHUN 2019			PERUBAHAN TAHUN 2019			CATATAN
					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1				2	3	4	5		6	7	8
2	09	19	10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas	Cakupan Perencanaan Pengaturan Lalu-lintas Terpenuhi (%)	100	6.176.103.218,00	Cakupan Perencanaan Pengaturan Lalu-lintas Terpenuhi (%)	60	6.176.103.218,00	
2	09	25		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan Angka Kecelakaan (%)	30	336.410.052	Penurunan Angka Kecelakaan (%)	40	336.410.052	
2	09	25	01	Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi Teknologi Perhubungan yang di laksanakan (inovasi)	1	264.856.900,00	Inovasi Teknologi Perhubungan yang di laksanakan (inovasi)	1	264.856.900,00	
2	09	25	02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan , Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Penurunan Angka Kecelakaan (kerjasama)	3	14.481.000,00	Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Penurunan Angka Kecelakaan (kerjasama)	35	14.481.000,00	
2	09	25	03	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Rekomendasi Hasil Audit Keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	57.072.152,00	Rekomendasi Hasil Audit Keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	60	57.072.152,00	



Perubahan Renja PD Dishub tahun 2019 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja PD Dishub Tahun 2019 maka dilakukan perubahan Renja PD dengan Tujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Kebutuhan pendanaan PD Dishub Kabupaten Klungkung pada Perubahan Renja Tahun 2019 berkurang sebesar Rp. 1.131.972.963,00. Atau berkurang 5,22% dari anggaran induk DPA Tahun 2019, dimana Pagu Anggaran di Induk Tahun 2019 sebesar Rp. 21.680.478.636,00 sedangkan anggaran pagu pada Renja Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 20.548.505.673,00. Pengurangan ini dikarenakan adanya silpa dari anggaran kegiatan yang telah berjalan.

Pendanaan yang dibutuhkan pada Tahun 2019 menyesuaikan dengan kebutuhan yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 Dishub Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Dishub Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan dimana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga harus digunakan untuk tahun berjalan, Pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Alokasi anggaran pada Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2019 semula sebesar Rp. 21.680.478.636,00 berubah menjadi Rp. 20.548.505.673,00. Terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.131.972.963,00. atau berkurang 5,22 %. Pengurangan anggaran ini sebagai akibat dari adanya penghapusan kegiatan, efisiensi anggaran, pengurangan anggran silpa dari sisa tender proyek, perubahan lokasi kegiatan dan efisiensi anggaran lainnya dimana pada tahun 2019 dilaksanakan dengan target Kinerja Program dan Kegiatan yang telah ditentukan. Dengan tersusunnya Perubahan Renja PD Dishub Tahun 2019 termasuk kebutuhan pendanaannya maka dapat dicapai tujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan dapat menjadi acuan resmi bagi PD Dishub dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berjalan dengan kebutuhan yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 Dishub Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG



Drs. I NYOMAN SUCITRA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19621231 199003 1 147

